

SEMINAR NASIONAL

**INTELEKTUAL dan
KRISIS DEMOKRASI
di Indonesia**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG, 19 JUNI 2003**

KEMERDEKAAN ROH BANGSA DAN KAUM INTELEKTUAL:

SOSOK INTELEKTUAL INDONESIA

OLEH
FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

PENGANTAR

Dalam makalah ini saya tidak akan memberikan sebuah "pemetaan masalah kaum intelektual kurun waktu 1908-1998" sebagaimana ditulis dalam TOR. Pemetaan semacam itu hanya bisa diberikan oleh seorang sejarawan. Tetapi saya bukan sejarawan.

Daripada itu saya akan mencoba menggariskan pentingnya kaum intelektual bagi roh kemerdekaan bangsa Indonesia –penting tentu dengan syarat bahwa ia, sang intelektual, tidak mengkhianati panggilannya– sebagaimana banyak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia.

Pertama saya akan memetik beberapa tokoh intelektual Indonesia untuk melihat-lihat kekhasan mereka. Kedua, saya akan, dengan mengikuti "sang Intelektual" Edward Said, men-

coba menggariskan pandangan saya tentang ciri khas dan panggilan sang intelektual. Ketiga, dalam "penutup" saya akan mencoba memperlihatkan betapa aktual harapan akan peran kaum intelektual bagi Indonesia sekarang.

Akan tetapi sebelumnya saya menunjuk pada sebuah pengamatan yang bagi saya cukup menarik.

MEDIA DAN KAUM INTELEKTUAL

Di Indonesia Orde Baru ada kenyataan menarik. Dalam media Indonesia Orde Baru, kaum intelektual menikmati kedudukan istimewa. Bandingkan saja dengan koran Jerman, atau, kalau mau, *The Herald Tribune*. Di koran-koran Jerman percuma kita akan mencari nama tokoh-tokoh intelektual. Tajuk rencana dan lain kolom "pendapat" umumnya ditulis oleh jurnalis dari koran itu sendiri. Barangkali di bagian *Feuilleton* tokoh intelektual dibahas, atau bukunya yang baru. Akan tetapi pendapat seorang intelektual tentang situasi politik, tentang apa yang dilakukan pemerintah, percuma akan dicari. Tetapi di Indonesia pendapat seorang intelektual yang tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, barangkali dia hanya dosen di sebuah perguruan tinggi, dapat menjadi *headline* di halaman pertama! Para tokoh intelektual sering diwawancarai, pendapat mereka dikomentari. Coba, kapan *Die Frankfurter Allgemeine* akan minta Profesor Jürgen Habermas memberikan penda-

patnya, misalnya tentang rencana UU kewarganegaraan? Atau pun tentang pemilihan umum? Jawabannya ialah: tak pernah! Orang tidak peduli akan pendapat seorang Habermas atau seorang Lyotard. Pendapat-pendapat yang dilaporkan dan dibahas adalah pendapat para politisi, orang-orang pemerintah dan tokoh-tokoh partai. Tentang kaum intelektual, siapa yang peduli.

Mengapa di Indonesia lain? Karena di bawah resim Soeharto orang sudah bosan mendengar pemerintah, orang-orang Golkar, bahkan Pak Harto sendiri. Karena mereka selalu hanya omong itu-itulah saja. Di bawah Pak Harto terjadi sesuatu yang khas bagi negara totaliter maupun negara paternalistik (= totaliter lunak): Karena seluruh pendapat resmi sudah ditetapkan oleh pemerintah dan semua pihak resmi harus mengulanginya, masyarakat tidak tertarik, sudah bosan, bahkan apriori sudah tidak percaya pada apa yang resmi dikumandangkan. Adalah sebuah ironi bahwa di negara totaliter dan paternalistik penguasa justru mengebiri propagandanya sendiri. Karena semua pendapat yang tidak searah dengan penguasa disingkirkan, masyarakat justru mengantisipasi bahwa apa pun yang dikatakan pemerintah dengan sendirinya selalu *oratio pro domo*, selalu mau menguntungkan pemerintah, dan karena itu tidak dipercayai dan tidak menarik.

Nah orang intelektual adalah orang yang pintar mengatakan hal-hal oposisional sedemikian rupa hingga ia *gets away with it*. Karena ia betul-betul menguasai seni bicara, dan di lain pihak tidak langsung tergantung dari seorang atasan yang berhak menentukan apa yang boleh dikatakan, ia dapat mengatakan hal-hal yang tidak berani dikatakan oleh kaum politisi. Ia pandai membungkusnya misalnya sebagai pendapat abstrak teoretis (tetapi pembaca biasa pun tahu apa yang dimaksud) atau dalam rangka sebuah perbandingan ilmiah. Karena kaum intelektual itu satu-satunya pihak yang mampu menyuarakan pandangan alternatif, mereka diperhatikan.

Karena itu memang tidak mustahil bahwa, semakin mantap kehidupan demokratis, semakin peran kaum intelektual juga akan berkurang, akan tetapi sementara ini kaum intelektual masih sangat diperhatikan.

Namun justru di sini letak juga masalah kaum intelektual. Mereka umumnya bukan malaekat kejujuran intelektual sebagaimana diperkirakan atau diharapkan oleh masyarakat. Menurut Edward Said*, mereka sering mengambang di antara dua ekstrem: Menjadi "intelektual organik" dalam arti Gramsci yang begitu saja menyuarakan kepentingan sebuah kelas atau gerakan ideologis (dan lalu sebenarnya tidak lebih dari-

* Edward W. Said 1994, *Representations of the Intellectual. The 1993 Reith Lectures*, London: Vintage, h. 4.

pada tukang propaganda) atau menjadi "filosof raja" super-cerdas dan berbudi luhur à la Julien Benda. Mereka sering tidak murni intelektual, tidak bebas dari pamrih, bahkan bersedia menjual ketrampilan mereka kepada yang mau membayar, tidak *integer*. Atau mereka sedemikian di atas segalanya sehingga omongan mereka tidak relevan lagi dan karena itu memang tanpa risiko.

SOSOK INTELEKTUAL INDONESIA

Generasi pertama

Kalau kita melihat mereka yang menjadi tokoh pergerakan nasional dan para pendiri bangsa maka yang mencolok adalah kadar intelektualitas mereka. Apa kita ambil Sukarno, Hatta, atau Tan Malakka, tetapi juga HOS Cokroaminoto, Supomo dan Adam Malik: Mereka itu semua khas orang intelektual. Kalau dengan orang intelektual kita maksud orang yang ingin tahu, asyik membaca, tertarik pada pemikiran dari mana pun asalnya, yang kritis, suka berdebat, yang tidak berhenti pada yang dangkal, melainkan selalu mencari kebenaran, yang tidak polos dan bersedia dikritik; maka mereka itu semua orang intelektual kelas wahid. Sukarno bisa mengutip para pemikir politik sedunia, sebagian dalam bahasa mereka sendiri. Hatta menulis buku "Pengantar Filsafat Yunani" yang sekarang pun masih pantas dibaca. Tan Malaka selalu membawa serta sebuah perpustakaan dalam perjalanan-perjalanan di penga-

singan (yang akhirnya hilang waktu ia kembali ke Indonesia); ia memimpikan sebuah bukit di mana semua tokoh pemikiran manusia segala aliran mendapat patungnya.

Barangkali tidak keliru juga bahwa salah satu motivasi mereka adalah membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah intelektualnya dengan bangsa Belanda, bangsa penjajah - mengingat Belanda, dengan "*ethische politieknya*", berlagak bahwa orang-orang "Insulinde" belum matang untuk merdeka. Tokoh-tokoh itu membuktikan secara cemerlang bahwa secara intelektual mereka tidak kalah dengan siapa pun, ukuran global! Itulah generasi pertama kaum intelektual.

Generasi kedua: Di bawah dua Presiden R.I. pertama

Generasi kedua cendekiawan Indonesia mau saya tarik jauh sekali. Seharusnya dibagi dan dirinci, akan tetapi saya memakai saja sebagai tahap kedua tahap sejak pengakuan terhadap kedaulatan Republik 1949 sampai jatuhnya resim Soeharto 1998. Waktu hampir 50 tahun itu itu ditandai oleh tiga tahap yang cukup jelas dapat dibedakan. Tahap pertama 1950 sampai 1959, yaitu tahap percobaan dan kegagalan pertama demokrasi di Indonesia. Tahap kedua adalah paling pendek, hanya berlangsung sedikit lebih dari tujuh tahun dari 1959, dekrit Presiden yang mengantarkan ke *demokrasi terpimpin*, sampai 1965/1966, patahnya kekuasaan Sukarno dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan Pak Harto. Tahap ketiga adalah

tahap yang bagi kami yang mengalaminya seluruhnya seakan-akan tidak mau berakhir, tahap Orde Baru. Di tahap itu fokus bangsa tidak lagi pada Belanda, meskipun Sukarno dengan kampanye "pembebasan Irian Barat" masih mencoba untuk memanfaatkan semangat anti-Belanda untuk menggalang dukungan rakyat. Tetapi di tahap itu perhatian bangsa terarah pada kekuasaan, jadi pada pemerintahan sendiri. Banyak tokoh intelektual bangsa memainkan peranan besar di waktu itu. Saya mau menyebutkan lima saja: Mochtar Lubis, Arief Budiman, Gunawan Muhammad, Nurcholish Madjid dan Pramudya Ananta Tur.

Mochtar Lubis, penerbit dan wartawan senior harian *Indonesia Raya* yang dilarang oleh Sukarno dan dihancurkan lagi oleh Soeharto, adalah seorang intelektual klasik dalam arti yang sebaik-baiknya. Lubis melawan korupsi elit politik dan segala kebohongan yang menyertainya. Tak jemu-jemunya ia membuka kasus-kasus korupsi, misalnya kasus Ruslan Abdulgani 1956 (kalau tak salah) seperti kemudian kasus korupsi di zaman pemerintahan Soeharto, khususnya di lingkungan Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Soetowo. Mochtar Lubis seakan-akan tidak mampu untuk diam berhadapan dengan dusta, kemunafikan, korupsi, kebohongan. Karena itu ia ditahan oleh Sukarno yang waktu itu sudah silau oleh keterpesonaannya dengan dirinya sendiri. Kemudian Soeharto memakai peristiwa *Malari* untuk melarang sekali lagi harian *Indonesia*

Raya sesudah Mochtar Lubis membongkar korupsi Pertamina yang baru beberapa tahun kemudian ketahuan memang sebesar 10 milyar US\$ dan hampir membangkrutkan bukan hanya Pertamina, melainkan negara.

Arief Budiman adalah salah seorang mahasiswa demonstran anti PKI dan anti Sukarno 1966. Namun ia tidak pernah mengakomodasikan diri dengan Orde Baru. Ia senantiasa mengkritik resim Pak Harto dengan berani dan akhirnya harus menyingkir ke luar negeri. Arief Budiman, seorang anti-komunis kokoh, dengan sama tegasnya melawan kapitalisme, termasuk "kapitalisme *Ersatz*" di Indonesia. Dengan melawankan pendekatan struktural –yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa di belakang kebijakan pembangunan– dengan pendekatan kultural yang memperhatikan nilai-nilai masyarakat, Arief Budiman berani memperlihatkan bahwa pendekatan kultural merupakan kedok ideologis kepentingan elit Orde Baru untuk melegitimasi monopoli kekuasaan mereka. Tanpa takut-takut Arief Budiman membuka unsur-unsur ideologis dalam "ideologi pembangunan" Orde Baru.

Lain lagi *Pramudia Ananta Tur*, penulis Indonesia barangkali terbesar segala zaman, yang buku-bukunya diterjemahkan ke dalam sekian banyak bahasa internasional. Sejak ia mulai menerjemahkan pengalaman-pengalaman selama pe-

rang kemerdekaan ke dalam ceritera dan novelnya Pram berfokus pada penderitaan orang kecil, orang yang di bawah Belanda, dan kemudian di bawah kekuasaan elit bangsa sendiri tidak dianggap. Bahwa ia melibatkan diri dalam Lekra, lembaga kebudayaan yang dinaungi oleh Partai Komunis Indonesia harus dibayar dengan 14 tahun tahanan keras di luar jalur hukum, sebagian besar di pulau Buru. Tetapi pengalaman keji itu tidak mematahkan semangatnya. Roman-roman yang ditulisnya waktu itu dan sesudahnya, meskipun selalu langsung dilarang oleh Jaksa Agung resim Orde Baru, menjadi sastra dunia yang mengangkat sejarah Indonesia melalui teropong orang kecil. Pram itu contoh seorang intelektual yang tidak bersedia membengkokkan punggungnya.

Lawan Pram, dalam arti tertentu, adalah *Gunawan Muhammad*, penandatanganan Manifesto Kebudayaan 1963 yang berani menuntut kebebasan ekspresi yang kemudian dikecam oleh PKI serta oleh sebagian besar apa yang menamakan diri kaum intelektual di bawah Sukarno, tetapi juga oleh Pramudia dengan Lekranya. Gunawan tokoh lawan PKI dan kemudian pemerintahan Sukarno yang di bawah pemerintahan Soeharto tidak tunduk. Majalahnya, *Tempo*, selama sebagian besar Orde Baru dengan sukses berusaha menjaga kebebasannya dan menyuarakan kritik. Akhirnya *Tempo* dilarang di tahun 1995 oleh Menteri Penerangan Harmoko atas perintah langsung Soeharto sesudah *Tempo* menertawakan pembelian 39

kapal perang eks Jerman Timur yang membuka kemungkinan korupsi lebar-lebar. Gunawan Muhammad juga tidak pernah tunduk terhadap tekanan pihak-pihak sektarian dan fanatik.

Lain lagi sosok *Nurcholish Madjid*. Nurcholish selalu menahan diri, lama menjadi pendukung Golkar, tidak pernah beroposisi, tetapi juga tidak pernah menjual jiwanya. Lawan-lawan Nurcholish paling keras, kadang-kadang ganas, ditemukan dalam kelompok-kelompok Islam garis keras. Pertama kali Nurcholish berani mengejutkan Islam politik di tahun 1970 waktu ia menyatakan bahwa sekularisasi justru tuntutan Islam, dengan semboyan "Islam yes, partai Islam no". Nurcholish dengan ini menunjukkan wawasan jauh ke depan dan jauh lebih realistik daripada seluruh angkatan eks-Masyumi yang menggantungkan nasib Islam di negeri ini pada pengizinan kembali partai Masyumi. 1992, sesudah Nurcholish memperlihatkan bahwa Islam itu agama inklusif, ia dicaci maki secara kasar di Taman Ismail Marjuki sebagai Zionis dan penyesat. Meskipun ia, lain dari Arief Budiman, juga lain dari Gunawan Muhammad, tidak pernah mengambil posisi langsung berlawanan dengan penguasa, namun ia menjaga kejujuran intelektual dan sebagai itu menjadi sosok yang memberikan arah kepada orang muda, khususnya, tetapi tidak hanya, Muslim yang mau tetap setia seratus persen pada Islam, di lain pihak juga mau menjadi orang yang tidak kalah dalam keterbukaan modernitas dengan semua budaya lain di dunia.

Masa pasca-Orde Baru

Kalau di masa Sukarno dan Suharto pertahanan harkat dan kebebasan manusia Indonesia menjadi sasaran para tokoh intelektual yang sesungguhnya, maka di periode kita sekarang, periode pasca Orde Baru atau "masa Reformasi yang gagal", sasaran dan medan membenaran diri bergeser. Bukan lagi penguasa yang menjadi acuan, melainkan tiga ancaman terbesar periode kita sekarang, yaitu *korupsi* seluruh elit politik, *kebiadaban* di kalangan rakyat dan *sektarianisme primordialistik* kaum fanatik. Yang mencolok bahwa sekarang *kaum perempuan* muncul ke depan (yang sebelumnya tentu juga bukannya tak ada): Wardah Hafiz, Karlina Supelli, Nuryahbani Kacasungkana untuk menyebutkan beberapa saja dari mereka. Tentu juga orang seperti Rama Sandyawan dengan tim relawan dan almarhum Rama Mangunwijaya dapat disebut di sini. Lalu orang-orang muda seperti Ulil Absor Abdallah pendiri jaringan Islam Liberal. Yang khas bagi mereka bahwa mereka tidak jarang diancam dengan kasar. Dapat dikatakan bahwa mereka itu lebih terancam daripada di masa Suharto. Ancaman itu adalah kebrutalan langsung kelompok-kelompok yang mengatasnamakan nilai-nilai bagus seperti nasionalisme, kehormatan bangsa, agama, atau keanak-buahan, namun sebenarnya melampiaskan watak kepremanan mereka untuk mengancam, menyerang, merusak, memukul. Wardah Hafiz, Ketua *Urban Poor Consortiumnya*, pernah di-

pukul oleh bajingan-bajingan yang diperkirakan dibayar oleh pimpinan DKI. Kebencian kelompok-kelompok anti-intelektual, di mana juga Aliansi Anti-Komunis dari dua tahun lalu termasuk, berdasarkan kenyataan bahwa mereka tidak mampu mengkonter argumentasi kaum intelektual objek kebencian mereka. Mereka adalah hasil budaya preman yang semakin meresapi elit politik pasca Soeharto.

APA ITU, SEORANG INTELEKTUAL?

Sesudah kita sekedar melihat beberapa sosok utama di panggung intelektualisme Indonesia, mari kita sekarang bertanya apakah ciri dan tugas seorang intelektual. Dalam ini saya mengikuti seorang tokoh intelektual yang diakui secara internasional, Edward Said, seorang Palestina yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat.

Said tidak tanggung-tanggung. Baginya orang intelektual adalah "pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa" [Said 63s.]. Inilah faham inti Said tentang seorang intelektual. Seorang intelektual mengatakan apa yang dianggapnya benar, entah sesuai atau tidak dengan kuasa-kuasa yang ada! Maka ia lebih cenderung ke oposisi daripada ke akomodasi. Dosa paling besar orang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan, tetapi mengatakan apa yang senang didengar oleh pemerintah, elit,

massa. Ia tidak pernah boleh mau mengabdikan kepada mereka yang berkuasa.

Yang menarik adalah bahwa Said melawankan si intelektual terhadap si profesional [Said 55]. Soalnya, profesionalisme menuntut penyesuaian dengan batas-batas objektif dalam bidangnya, tetapi di situ tidak hanya termasuk hukum-hukum profesinya, melainkan juga bingkai kekuasaan dan kepentingan di dalamnya si profesional harus berhasil. Maka seorang profesional harus "bijaksana", tahu batas-batasnya, ia sudah terdomestikasi. Seorang intelektual yang terdomestikasi sudah bukan intelektual lagi.

Menurut Said hidup seorang intelektual pada hakekatnya adalah mengenai pengetahuan dan kebebasan. Pertanyaan dasar yang diajukannya adalah: "Bagaimana orang mengatakan kebenaran? Kebenaran apa? Bagi siapa dan di mana?" Maka ia tidak dapat menjadi milik siapa-siapa. Dan karena itu ia sering dianggap berbahaya. Ia boleh saja solider dengan kelompoknya, tetapi selalu dengan kritis. Dan karena itu ia mudah dicurigai sebagai tidak loyal. Ia pada hakekatnya berjuang sendirian. Berhadapan dengan *audiencenya* ia tidak pertamanya mau membuat mereka puas, melainkan menantang mereka.

Karena keterlibatannya kepada kebenaran, ia justru tidak dapat menjual diri pada pihak mana pun. Ia harus menantang "ajaran ortodoks dan dogma", baik yang religius maupun yang politik. Itulah fungsi publiknya. Ia sosok yang mewakili: Di depan publik ia mewakili suatu pendirian. Menurut Said seorang intelektual mesti terlibat dalam konflik dengan "para penjaga visi atau teks suci" [Said 65]. Dalam arti ini dia "makhluk sekuler" [Said 89].

Karena itu ia harus berpihak pada kebenaran dan keadilan dan tidak membedakan antara orang dari partai, agama, alirannya sendiri dan yang bukan. "Kalau anda mau membela keadilan manusiawi dasar, anda harus melakukannya bagi siapa saja, bukan hanya secara selektif bagi mereka yang didukung oleh orang-orang di pihak anda, di budaya anda, di bangsa anda" [Said 69].

Dari pendapat Edward Said itu, adanya organisasi-organisasi cendekiawan yang berdasarkan agama menjadi masalah: Dapatkah orang-orang intelektual itu mempertahankan kemandirian mereka, keberanian untuk bersikap kritis, untuk tidak menggantungkan bendera pendapat menurut oportunitas organisasinya, untuk mengambil sikap yang non-primordial, non-sektarian, semata-mata berdasarkan kebenaran dan keadilan? "Sejauh mana loyalitas terhadap suatu cita-cita ha-

rus membuatnya secara konsisten setia kepadanya" [Said 79]?

Dilema orang intelektual berkaitan dengan sebuah kepercayaan religius yang diyakininya muncul di dua tingkat. Pertama di level yang bisa disebut loyalitas lurus. Misalnya, saya seorang Katolik. Anda barangkali orang Buddha. Kita dua-duanya yakin bahwa kepercayaan kita bukan sebuah ideologi buatan manusia, melainkan berasal dari suatu dimensi adi-dunia yang menyeluruh, yang tidak mungkin kita "pertanyakan" atau kita "tuntut legitimasinya", melainkan yang tinggal diterima, dipercayai, dicintai, dilaksanakan. Nah, apakah hal itu berarti bahwa kita harus loyal seratus persen terhadap apa yang oleh para pendeta atau bhikku dikumandangkan sebagai inti agama? Apakah pikiran harus dihentikan, apakah segala pemberontakan kritis terhadap pelbagai sudut ajaran, apalagi ideologi dan kelakuan, agama kita harus ditekan?

Edward Said mengajukan masalah itu dari sudut Islam dan dalam konteks Timur Tengah. Pendapatnya jelas: "Mera-takan perselisihan pendapat dan perbedaan, apalagi adanya interpretasi Islam yang begitu berbeda satu sama lain, bukanlah, itulah pendapatku, peran orang intelektual" [Said 29] Said menegaskan bahwa intelektual Muslim diharapkan menekankan ciri Islam yang kompleks dan heterodoks. Bukan hanya itu, ia harus "menuntut mereka yang berwenang dalam umat

Islam untuk menghadapi tantangan minoritas-minoritas bukan Islam, hak-hak perempuan, hak-hak modernitas sendiri, dengan perhatian manusiawi dan re-evaluasi jujur, bukan dengan lagu-lagu dogmatik atau pseudo-populis" [Said 30]. Hal itu tentu berlaku sama saja bagi kaum intelektual semua agama berhadapan dengan masalah-masalah yang peka pada agama mereka masing-masing. Maka jelas juga bahwa si intelektual selalu berada dalam risiko dicurigai, bahkan dicaci-maki, kalau tidak disingkirkan atau masuk dalam bahaya dimusnahkan oleh para fanatik dalam agamanya sendiri yang tidak tahan terhadap pertanyaan-pertanyaannya yang mengancam faham sempit mereka.

Level kedua lebih gawat lagi. Itu level politik. Orang intelektual yang misalnya mengikuti salah satu partai politik atau kelompok kepentingan politik, terutama atas dasar sebuah ideologi atau agama, demi oportunitas politik lalu diam terhadap keyakinan-keyakinan moral dan politik mereka. Mereka mengkhianati cita-cita mereka sendiri. Menurut Said "tunduk tanpa reserve terhadap fihak yang berkuasa dalam dunia sekarang adalah salah satu ancaman terbesar terhadap hidup intelektual yang aktif dan moral" [Said 90].

Di sini muncul seluruh masalah bahwa dalam kenyataan kaum intelektual sering menjual diri kepada penguasa: Apa demi pembayaran, atau, lebih mungkin, karena mereka mera-

sa bisa 'dipakai'. Mereka menempatkan ketajaman berpikir mereka dalam pengabdian kepentingan politik penguasa, menjadi produsen makna demi propaganda, menjadi apa yang dulu dianggap begawan atau kiai istana. Cukup mengejutkan betapa banyak orang intelektual yang tanpa reserve mengabdikan diri pada sebuah ideologi, misalnya dalam gerakan Nazi di Jerman, dalam pelbagai resim Komunis dan Marxis, dalam resim-resim berdasarkan agama atau ideologi lain. Kita ingat pelbagai intelektual terkemuka Eropa yang tetap menjadi anggota partai Komunis di Perancis bahkan sesudah Uni Soviet menumpas secara brutal pemberontakan Hongaria di tahun 1956 dan sesudah pasukan Pakta Warsawa menumpas eksperimen "komunisme dengan wajah manusia-wi" di Cekoslovakia tahun 1968. Sayang, pengkhianatan kaum intelektual bukan suatu fenomena sampingan saja. Di situ saya juga mau menyuarakan kecurigaan saya terhadap apa yang oleh Gramsci disebut *intelektual organik*. Kalau dia betul-betul "organik", jadi selalu mempropagandakan kepentingan sebuah kelas sosial, ia sudah mengkhianati kejujuran dan kebebasan intelektualnya. Kalau "organik" hanya bermaksud "bersimpati", itu oke dan bahkan bagus. Seorang intelektual tentu boleh berpihak, misalnya pada orang tertindas. Tetapi apabila organik berarti begitu saja menyuarakan "kepentingan kelas" yang bersangkutan, dia sudah melepaskan keintelektualannya.

PENUTUP

Uraian ini, harapan saya, memperlihatkan betapa kunci peran kaum intelektual di tubuh bangsa Indonesia. Mereka adalah garam intelektual masyarakat yang harusnya mencegah kehidupan intelektual bangsa menjadi tawar dan basi. Mereka-lah unsur yang kritis, kreatif, alternatif, yang dapat membuka wawasan baru, yang jauh-jauh sebelumnya memperingatkan kalau masyarakat mau masuk jalan buntu, yang menentukan usaha-usaha yang mematikan, menumpulkan. Mereka diperlukan dan sekaligus dicurigai penguasa. Mereka adalah pembela kebebasan berfikir dan berbicara. Masyarakat pun membutuhkan kaum cendekiawan: Keterbukaan mereka, keberanian mereka untuk berfikir konsekuen, untuk menggali sampai ke akar sebuah masalah, sikap skeptik mereka terhadap slogan-slogan yang menggebu-gebu. Begitu pula agama-agama sangat membutuhkan peran kaum intelektual, karena merekalah terutama yang mencegah bahwa agama menjadi sesuatu yang baku, basi dan busuk.

Adalah kaum intelektual yang membongkar pesona kebohongan ideologis para penguasa serta mendobrak kebrutalan kelompok fanatik yang membajak cita-cita luhur agama atau kebangsaan demi kepicikan, dan kadang-kadang, kepentingan material mereka. Apabila resim politik bersifat kediktatoran, resim itulah yang akan berusaha membungkamkan kaum in-

telektual. Dalam demokrasi – sebagaimana sudah diperlihatkan dengan cemerlang 150 tahun lalu oleh John Stuart Mill ("*On Liberty*") – ancaman terhadap kebebasan berpikir datang dari massa yang fanatik-tolol-sempit dan pihak-pihak anti-kecerdasan lainnya. Karena itu adanya kaum intelektual yang tidak tunduk terhadap kekuatan-kekuatan kegelapan merupakan jaminan terpenting Roh Kemerdekaan suatu bangsa. Kaum intelektuallah penjaga kemerdekaan rohani yang menjadi syarat keberhasilan demokrasi.

Maka kalau Indonesia mau membangunkan kehidupan demokratis, peran orang-orang intelektual yang tidak tunduk terhadap tekanan penguasa, massa, organisasi agama dll. amat diperlukan. Maka hak untuk mencari informasi, hak untuk bebas membaca buku apa saja, hak untuk menawarkan informasi ke masyarakat, hak untuk mengetahui dan mau mengetahui, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mengkritik segala fenomena kehidupan bersama manusia, termasuk agama, perlu dibela sebagai unsur kunci dalam menjamin masa depan bangsa. Harapan saya bahwa universitas-universitas di negara ini tetap menjadi tempat di mana sebagian mahasiswa menemukan panggilan mereka, serta memperoleh kecakapan, sebagai orang intelektual sejati. ■

